BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan mengenai tinjauan permukiman, permukiman kumuh, karakteristik permukiman kumuh, kriteria rumah sehat dan kebijakan dalam mengatasi permukiman kumuh. Selanjutnya pada bagian berikut akan dijabarkan secara lebih lanjut tentang studi literatur yang telah dilakukan.

2.1 Permukiman

Permukiman adalah area yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menunjang kehidupan serta merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan (Menpera, 2011). Sedangkan menurut Marlina (2006) permukiman dapat digunakan sebagai suatu tempat bermukim manusia yang menunjuk suatu tujuan tertentu, dengan demikian permukiman seharusnya memberikan kenyamanan kepada penghuninya serta orang yang datang ke tempat tersebut. Berikut ini yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat yaitu: menumpuknya sampah domestik, becek dan banjir, pencemaran air, udara dan sanitasi lingkungan yang tidak baik (Angkotasan, 2012).

Suatu status tanah yang digunakan dalam permukiman suatu yang wajib. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak dan tanah. Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas kepemilikannya. Berdasarkan Undang-undang Pertanahan No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Macam-macam status lahan tanah yaitu :

- Hak Guna Bangunan
- Hak Pakai
- Tanah Bebas
- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Sewa
- Tanah Negara

2.2 Permukiman kumuh

Menurut Budiharjo (1991), masalah permukiman manusia merupakan masalah yang pelik, karena begitu banyaknya faktor-faktor yang saling berkaitan tumpang tindih di dalamnya. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja, tetapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari para penghuninya.

Sedangkan menurut Sadyohutomo (2008), permukiman kumuh yaitu tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur di pinggiran kota yang penghuninya umumnya berasal dari luar daerah. Sebagian dari permukiman ini merupakan permukiman yang ilegal pada tanah yang bukan miliknya, tanpa seijin pemegang hak tanah sehingga disebut sebagai permukiman liar (*wild occupation* atau *squatter settlement*). Tanah-tanah yang diduduki secara liar ini adalah tanah-tanah pemerintah atau negara, misalnya sempadan sungai, sempadan pantai, dan tanah instansi yang tidak terawat.

Menurut Rindrojono (2013), kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

2.2.1 Ciri – Ciri Permukiman Kumuh

Ciri dari pemukiman kumuh adalah letak dan bentuk perumahan yang tidak teratur, sarana infra struktur kota sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali, tingkat pendidikan yang rendah, kepadatan bangunan dan penduduknya, pendapatan penduduk yang rendah, serta pada umumnya penduduknya bekerja disektor informal. Bangunan yang padat dan material bangunannya dalam keadan darurat tetapi karakteristk pemukiman kumuh sebenarnya terbagi-bagi dan tertentu. Menurut Anas (1995), ada tiga bentuk dasar pemukiman kumuh, yaitu :

a. Permukiman kumuh yang tumbuh karena adanya spekulasi demi mendapatkan ganti rugi bila digusur. Kondisi ini berlangsung secara perlahan-lahan menempati lahan kosong yang ada pada tempat terlarang di pusat kota.

b. *Menetap dan permanen*, yaiu pemukiman kumuh yang terjadi secara organis akibat semakin padatnya penduduk pada suatu kawasan. Pemukiman ini berasal dari lingkungan yang teratur tetapi lambat laun menjadi kumuh akibat kurang kontrolnya penendalian pembangunan oleh penghuni pemukiman tersebut.
c. Transito, yaitu bentuk pemukiman yang kumuh yang sifatnya sementara dan sebagian besar penghuninya menetap untuk sementara waktu.

Menurut Sinulingga (2005) ciri-ciri kampung/permukiman kumuh terdiri dari :

1. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/Ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.
2. Jalan-jalan sempit dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
3. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
4. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.
5. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.
6. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umunya tidak permanen dan malahan banyak sangat darurat.
7. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

2.2.2 Faktor – Faktor Penyebab Timbulnya Permukiman Kumuh

Penyebab utama timbulnya lingkungan kumuh antara lain urbanisasi dan yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, program perbaikan lingkungan yang

hanya dinikmati oleh para pemilik rumah (misalnya tarif sewa rumah makin tinggi), dan disiplin warga yang rendah. Pemecahan masalah dilakukan antara lain melalui perbaikan kampung, peremajaan kota, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah sewa bertingkat, penataan lingkungan, penerapan pembudidayaan hidup bersih dan sehat, dan penyediaan tempat usaha (Komarudin, 1997).

Hariyanto (2008), mengatakan bahwa faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum* dan *Squatter*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung. Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik yaitu yang dicirikan dengan kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan. Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya masyarakat.

Penyebab munculnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut (Sadyohutomo, 2008):

- Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup.
- Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah bidang tanah dan membangun permukiman tanpa didasari perencanaan tapak (*site plan*) yang memadai. Akibatnya bentuk dan tata letak kaveling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi prasarana dasar permukiman.

Sedangkan Menurut Rindrojono (2013), Adapun faktor – faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan, yakni :

1. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio – ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa – jasa. Proses Urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang di alami oleh negara – negara yang sedang berkembang dan proses urbanisasi ini berlansung pesat di karenakan

daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota – kota besar.

Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa, memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah pinggiran ini.

2. Faktor Lahan Perkotaan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan.
Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyedian unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit – unit hunian di permukiman yang tidak layak.

3. Faktor Prasarana dan Sarana

Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

Pada umumnya sebagaian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi

masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan.

5. Faktor Tata Ruang

Dalam tata ruang, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan, bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung – kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi.

2.2.3 Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh

Menurut Budiharjo (2011), kondisi permukiman kumuh diperkotaan, banyak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan sosial yang ada pada masyarakat. Karakteristik fisik dan sosial yang diperkirakan berpengaruh terhadap permukiman kumuh perkotaan ini adalah : tingkat pendapatan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan penilaian masyarakat terhadap lingkungan permukimannya. Pengaruh faktor- faktor tersebut terhadap kondisi permukiman kumuh akan dikemukakan berikut ini :

- Faktor Pendapatan
- Faktor Tingkat Pendidikan
- Faktor Mata Pencaharian
- Faktor Anggota Keluarga
- Faktor Status Kepemilikan Lahan dan Bangunan

Didalam suatu permukiman atau rumah sehat suatu keluarga memerlukan suatu perkerjaan yang dapat menunjang aktifitas kehidupan sehari hari. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktifitas utama yang dilakukan oleh manusia. Perkerjaan ysng dijalain seseorang dalam dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai karir,

berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan menurut data Badan Pusat Statistik (2004):

a. PNS/TNI/Polri
b. Buruh (tani/industri)
c. Wiraswasta
d. Nelayan
e. Pedagang
f. Karyawan/Pekerjaan
g. Ibu Rumah Tangga
h. Tidak Bekerja
i. Jasa

2.3 Bantaran dan Sempadan Sungai

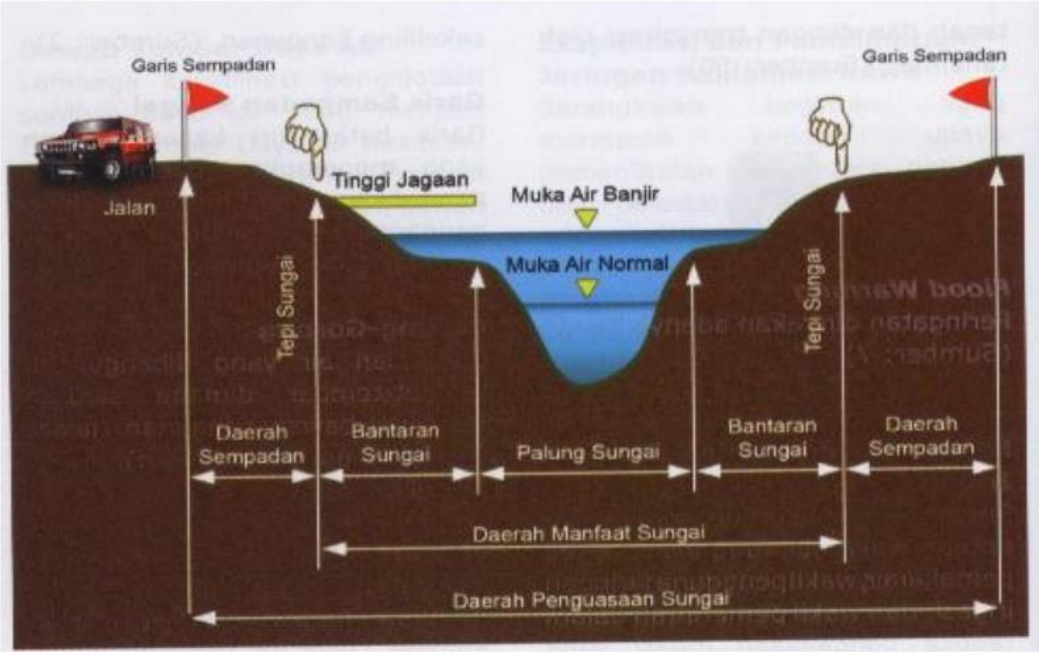
Menurut PP No 38 Tahun 2011 tentang sungai, bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Sedangkan tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alami yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.

Menurut PP No 38 Tahun 2011 (tentang sungai) garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman perencanaan garis sempadan antara lain:

- PP No 47/1997 menetapkan bahwa lebar sempadan sungai bertanggul di luar daerah permukiman adalah lebih dari 5 meter sepanjang kaki tanggul. Sedang lebar sempadan sungai yang tidak bertanggul di luar permukiman dan lebar sempadan sungai bertanggul dan tidak bertanggul di daerah permukiman, ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat berwenang.
- Menurut PP No 38 Tahun 2011(tentang sungai, tentang garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan) yaitu :
    a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter).
    b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter), dan

c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

- Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32. Tahun 1990 (tentang pengelolahan kawasan lindung) sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termaksud sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai. Lebar sempadan pada sungai besar 100 meter dari kiri dan kanan sungai, sedangkan lebar sempadan pada anak sungai di luar permukiman adalah 50 meter dari kiri dan kanan sungai.
- Permen PU, 1993 (tentang sungai). Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. Gambar sempadan sungai dapat dilihat pada **Gambar 2.1**:



Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 1993

Gambar 2.1
Gambar Penampang Sungai

2.4 Penanganan Rumah Kumuh

2.4.1 Kriteria Permukiman Kumuh

Adapun kriteria permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut.

a. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha).
b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah.
c. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya di bawah standar.
d. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan.
e. Hunian dibangun di atas tanah milik negara atau orang lain dan di luar perundang-undangan yang berlaku.

Parameter yang dipergunakan untuk menentukan penanganan rumah kumuh berpedoman pada Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Menjelaskan bahwa keriteria kekumuhan dapat dilihat dari beberapa aspek yang dapat dilihat pada **Tabel II – 1** di bawah ini :

Tabel II – 1
Kriteria Permukiman Kumuh

No.	Kriteria	Permasalahan
1.	Jalan Lingkungan	• Jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan permukiman • Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
2.	Penyediaan air bersih	• Ketidaktersediaan akses aman air minum • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
3.	Drainase Lingkungan	• Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan. • Ketidaktersediaan drainase • Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan • Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya. • Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk.

No.	Kriteria	Permasalahan
4.	Pengelolaan persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis. • Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis • Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelilaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
5.	Proteksi Kebakaran	▪ Tidak tersedianya pasokan air ▪ Tidak tersedianya jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran ▪ Tidak tersedianya sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinyan kebakaran ▪ Tidak tersedianya data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016

2.4.2 Pola Penanganan

Menurut Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pola – pola penanganan ada 3 berdasarkan hasil dari penilaian aspek kondisi kekumuhan yang dilihat dari kriteria kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Pola – pola penanganan tersebut yaitu:

- Pemugaran: perbaikan atau pembangunan kembali permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni. Kegiatan perbaikan rumah, sarana, prasarana, dan utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- Peremajaan: pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- Permukiman kembali: pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, sarana, prasarana dan utilitas dengan mengkaji terlebih dahulu pemanfaatan ruang atau legalitas tanah dan menyediakan hunian sementara untuk masyarakat terdampak. Berikut ini adalah pola penanganan untuk permukiman kumuh yang dapat dilihat pada **Tabel II – 2** :

Tabel II – 2
Pola Penanganan Permukiman Kumuh Menurut
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No	Klasifikasi Kekumuhan	Status Tanah	Pola – Pola Penanganan
1.	Kumuh Berat	Legal	Peremajaan
2.	Kumuh Berat	Ilegal	Permukiman Kembali
3.	Kumuh Sedang	Legal	Peremajaan
4.	Kumuh Sedang	Ilegal	Permukiman Kembali
5.	Kumuh Ringan	Legal	Pemugaran
6.	Kumuh Ringan	Ilegal	Permukiman Kembali

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016

Berikut ini adalah pola penanganan bangunan dan infrastruktur pendukung pada permukiman kumuh menurut jenis penanganannya menurut Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dapat dilihat pada **Tabel II – 3**:

Tabel II – 3
Penanganan Fisik Insfrastruktur menurut Pola Penanganan Permukiman Kumuh

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
1.	Bangunan Gedung	▪ Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.	▪ Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun ▪ Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung.	▪ Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya.
2.	Jalan Lingkungan	▪ Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.	▪ Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan ▪ Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti : penambahan lajur dan pelebaran badan jalan atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	▪ Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan tata rencana.
3.	Penyediaan air bersih	▪ Rehabilitasi unit penyediaan air bersih untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit – unit air baku, unit produksi dan jaringan unti distribusi dan unit pelayanan.	▪ Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air bersih, seperti penambahan komponen pada unit – unit air baku dan unit produksi. ▪ Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air bersih, seperti menambahkan/ memperluas jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	▪ Penyediaan air bersih pada lokasi baru sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air bersih.
4.	Drainase lingkungan	▪ Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti pergantian	▪ Peningkatan kapasitas/ jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. ▪ Peningkatan jangkaua pelayanan dari jaringan drainas, seperti pelebaran	▪ Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
		gorong – gorong, perbaikan struktur drainase	saluran atau menghubungkan jaringan drainase lokal yang sama namun belum tersambung.	
5.	Pengelolaan air limbah	▪ Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian komponen SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofilter, dan komponen sejenisnya.	▪ Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S ▪ Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T	▪ Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah.
6.	Pengelolaan persampahan	▪ Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	▪ Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. ▪ Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan persampahan.	▪ Pembangunan unit pengelilaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan.
7.	Proteksi kebakaran	▪ Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persayratan teknis awal dibangun, seperti penggantian	▪ Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran. ▪ Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup	▪ Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
		sarana dan prasarana proteksi kebakaran.	pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran	

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016

Pada **Tabel II – 4** di bawah ini menunjukan bahwa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memang memiliki hubungan dan relevansi dengan penelitain yang akan dilakukan, namun topik dan hasil penelitiannya berbeda, peneliti hanya menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai tambahan informasi dan gambaran – gambaran yang berguna dalam penyusunan penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Tabel II – 4
Penelitian Terdahulu

No.	Judul artikel	Penulis	Nama Jurnal	Vol, Nomer, Tahun & Halaman	Isi Jurnal
1.	**Judul Artikel :** Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat. **Lokasi :** Kecamatan Semampir, Kota Surabaya	Debora Catherine Butar Butar	Jurnal Teknik Pomits	Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6	**Masalah :** ▪ Penurunkan kualitas dari permukiman yang layak huni dan sehat, sehingga kondisi tersebut juga menyebabkan penurunan dari kualitas hidup masyarakatnya baik dari segi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakatnya. ▪ Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam usaha penataan permukiman kumuh agar penataan yang dilakukan akan sesuai dengan keinginan masyarakat. **Tujuan :** ▪ Untuk mendapatkan arahan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Semampir. **Metode Analisis :** ▪ Analisis Deskriptif Kuantitatif ▪ Analisis Korelasi Crosstabs ▪ Analisis Triangulasi **Variabel :** ▪ Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ▪ Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat. **Output :** ▪ Arahan penataan permukiman kumuh dengan pendekatan partisipasi masyarakat.
2.	**Judul Artikel :** Pelaksanaan Program Kemitraan	Amri Yulian Fahmy, Agus Suryono, Farida Nurani	Jurnal Administrasi Publik (JAP)	Vol. 1, No. 6, Hal. 1159-1167	**Masalah :** ▪ Tidak semua masyarakat menge-tahui secara menyeluruh esensi dari pro-gram PLP–BK. dimana, dengan adanya program ini masyarakat

No.	Judul artikel	Penulis	Nama Jurnal	Vol, Nomer, Tahun & Halaman	Isi Jurnal
	Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas **Lokasi :** Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang				di setiap wilayah Desa Sengguruh mengajukan aspirasinya akan kebutuhan infrastruktur. **Tujuan :** ▪ Untuk mengetahui pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komu-nitas (PLP–BK) di Desa Sengguruh dengan menjalin kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sasaran program. Dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Ber-basis Komunitas (PLP–BK) di Desa Sengguruh. **Metode Analisis :** ▪ analisis Miles & Huberman **Output :** ▪ Bentuk Kesadaran Masyarakat
3.	**Judul Artikel :** Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh **Lokasi :** Podosugih, Kota Pekalongan	Indah Dwi Lestari dan Ir. Agung Sugiri	Jurnal Teknik PWK;	Vol. 2; No. 1; 2013; hal. 30-41	**Masalah :** ▪ Menanggapi masalah kemiskinan di Kota Pekalongan, P2KP Kota Pekalongan berusaha mensinergiskan peran antara pemerintah dan masyarakat sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan. Upaya tersebut dengan membentuk sebuah lembaga dalam masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM merupakan lembaga perwakilan dari masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungan. **Tujuan :** ▪ Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran kelompok Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam kaitannya penanganan masalah permukiman kumuh di Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan. **Metode Analisis :** ▪ Metode Analisis Kuantitatif

No.	Judul artikel	Penulis	Nama Jurnal	Vol, Nomer, Tahun & Halaman	Isi Jurnal
					Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitiannya. Pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan akan berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah. **Variabel :** ▪ Penyebab Permukiman Kumuh ▪ Penanganan Permukiman Kumuh **Output :** Rekomendasi - BKM Kelurahan Podosugih. Meningkatkan keaktifan anggota BKM yang kurang aktif agar pembangunan semakin baik lagi. - Pemerintah Kota Pekalongan dengan keberhasilan BKM Podosugih ini diharapkan menjadi inspirasi pemerintah untuk mengembangkan BKM lain yang sudah ada di Kota Pekalongan. - Masyarakat, untuk tetap menjaga kepedulian terhadap lingkungan yang selama ini sudah baik agar tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Studi terkait, Penangangan permukiman/lingkungan kumuh tidak hanya dilihat dari peran pemerintah, namun lebih riil jika dilihat dari peran masyarakatnya. Penelitian ini tidak memabahas keberlanjutan finansial dalam pendanaan pembangunan proyek sehingga dapat dijadikan rekomendasi penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain.

No.	Judul artikel	Penulis	Nama Jurnal	Vol, Nomer, Tahun & Halaman	Isi Jurnal
4.	**Judul Artikel :** Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso **Lokasi :** Kelurahan Ploso	Sekar Ayu Advianty dan Ketut Dewi Martha Erli Handayeni	Jurnal Teknik Pomits	Vol. 2, No. 2, (2013) hal. 191 - 196	**Masalah :** ▪ Permasalahannya adalah pada daerah Ploso Timur yang mengalami kendala dalam pelaksanaan program perbaikan lingkungan PNPM Mandiri Tahap I tahun 2012 karena masyarakat menolak adanya pavingisasi, meskipun kondisi jalan lingkungan mereka kurang baik. Saat pihak Kecamatan Tambaksari melakukan pemantauan menjelang waktu evaluasi, diketahui bahwa pelaksanaan program perbaikan jalan tersebut belum selesai. Rendahnya partisipasi masyarakat yang dilatarbelakangi oleh rasa kurang memiliki terhadap kawasan tempat tinggal mereka menyebabkan kawasan tersebut tetap kumuh. **Tujuan :** Tujuan Penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, maka dari itu tujuannya : [1] Dalam pendekatan tersebut perlu mengetahui tingkat partisipasinya. [2] Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. **Metode Analisis :** ▪ Analisis tingkat kekumuhan ▪ Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat kekumuhan ▪ Analisis keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhitingkat partisipasi masyarakat pada permukiman kumuh **Variabel :** ▪ Tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor yang secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat partisipasi. Faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat partisipasi yang berasal dari kondisi pendukung partisipasi yaitu frekuensi dilibatkannya masyarakat, keinginan masyarakat untuk terlibat, frekuensi kehadiran masyarakat dalam program/ kegiatan perbaikan lingkungan, jumlah jenis sumbangan yang diberikan; dan dari kondisi ekonomi sosial masyarakat yaitu lama tinggal.

No.	Judul artikel	Penulis	Nama Jurnal	Vol, Nomer, Tahun & Halaman	Isi Jurnal
					▪ **Output :** Arahan Penataan Permukiman Kumuh dengan Partisipasi masyarakat melalu tingkat kekumuhan.
5.	**Judul Artikel :** Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh **Lokasi :** Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat	Niken Fitria dan Rulli Pratiwi Setiawan	Jurnal Teknik Pomits	Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539	**Masalah :** ▪ Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan tipologi kekumuhan, kumuh ringan, sedang hingga berat. Secara umum, apabila dilihat secara fisik, masing- masing tingkat RW kumuh tersebut memiliki karakteristik dasar yang beragam teridiri dari 7 RW yang ada di Kelurahan Kapuk. Sedangkan, Rw yang tingkat kekumuhannya berat memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Ada beberapa program pemerintah untuk berusaha memperbaiki lingkungan kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk, namun program yang ada belum berhasil untuk menangani lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini untuk merumuskan arahan yang tepat terkait peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. . **Metode Analisis :** ▪ Analisis statistical descriptive **Variabel :** ▪ Permukiman Kumuh Ringan a. Aspek sarana dan prasarana b. Aspek fisik c. Aspek sosial d. Aspek ekonomi

No.	Judul artikel	Penulis	Nama Jurnal	Vol, Nomer, Tahun & Halaman	Isi Jurnal
					e. Aspek Bahaya ▪ Permukiman Kumuh Sedang a. Aspek sarana dan prasarana b. Aspek fisik c. Aspek sosial d. Aspek ekonomi e. Aspek Bahaya ▪ Aspek Kumuh Berat a. Aspek sarana dan prasarana b. Aspek fisik c. Aspek sosial d. Aspek ekonomi e. Aspek Bahaya **Output :** Arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Sumber: Hasil Analisis, 2016